

ANALISIS YURIDIS HAK INGKAR NOTARIS TERKAIT PEMBUKAAN KERAHASIAAN ISI AKTA KEPADA PIHAK KETIGA TANPA HAK DAN IJIN

Muhammad Zaini

Magister Kenotariatan Universitas Islam Malang

Email: muhammad.zaini8882@gmail.com

ABSTRAK

Notaris memiliki jabatan kepercayaan dari orang yang bersedia menyerahkan kepercayaannya kepada notaris dan notaris mempunyai kewajiban dalam menjaga rahasia semua yang diberitahukan kepada notaris, meskipun hal itu tidak tercantum didalam akta. Notaris juga berkewajiban untuk membuat akta dan apa yang ingin dicantumkan oleh para pihak serta notaris wajib berkewajiban untuk membacakan akta sehingga para pihak yang membuat akta paham akan isi dalam akta dan akses pada informasi tetap diberikan, termasuk kepada akses pada peraturan perundang-undangan yang sejalan, sesuai dengan isi dalam akta yang diminta oleh para pihak. Rumusan masalahnya yaitu pengaturan secara hukum mengenai ketentuan notaris yang dapat menggunakan hak ingkar kepada pihak ketiga serta perlindungan dan akibat hukum terhadap notaris terkait pembukaan kerahasiaan akta. Metode penelitian menggunakan yuridis normatif dan menggunakan teknik analisa deskriptif

Kata Kunci: Notaris, Rahasia Akta, Para Pihak, Hak Ingkar

ABSTRACT

The notary has a position of trust from the person who is willing to give up his trust to the notary and the notary has the obligation to keep the secret of everything that is notified to the notary, even though it is not stated in the deed. The notary is also obliged to make a deed and what the parties want to include and the notary is obliged to read out the deed so that the parties who make the deed understand the contents of the deed and provide access to information, including access to relevant legislation in accordance with the contents of the deed. requested by the parties. The formulation of the problem is the legal arrangement regarding the provisions of the notary who can use the right of denial to third parties as well as the protection and legal consequences of the notary regarding the disclosure of the confidentiality of the deed. The research method uses normative juridical and uses descriptive analysis techniques

Keywords: Notary, Secret Deed, Parties, Right of Denial

PENDAHULUAN

Dalam perkembangan zaman, tugas dan tuntutan pada pemerintah Indonesia semakin besar terlebih untuk memajukan segala aspek di negara ini dengan mengikuti kepentingan masyarakat yang sesuai dasar hukum negara Indonesia yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pancasila. Untuk turut membantu memelihara serta melaksanakan penerusan pembangunan yang selalu berkesinambungan, masyarakat menuntut pemerintah untuk menciptakan system yang mampu mendorong perkembangan nasional yang juga bisa diterima dan diterapkan dalam masyarakat itu sendiri.

Banyaknya negara berkembang dan maju di seluruh Asia terutama Asia Timur dan Asia Barat seakan mampu mendorong pemerintah Indonesia untuk berkembang seperti mereka, meskipun sampai saat ini kinerja tersebut belum begitu terlalu terlihat dan dengan baik. Perkembangan tersebut salah satunya yaitu pengaturan mengenai akta notaris, yang mana akta notaris ini berperan sangat penting di negara ini, karena segala sesuatu wajib dibawah naungan hukum apabila ingin dilindungi oleh hukum, agar tidak terjadi hal yang merugikan masyarakat di Indonesia.

Selain itu, notaris juga menjabat menjadi pejabat umum. Dalam Bahasa Belanda, pejabat umum disebut *Openbare Ambtenaren*. Sebagaimana ditulis pada Pasal 1 Peraturan Jabatan Notaris, menyatakan, “notaris adalah pejabat umum satu-satunya yang berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum tersebut dan

mendidik anak-anak itu untuk menjadi anggota masyarakat yang sempurna”. Pengertian notaris juga dijelaskan pada Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2004 (UUJN) dijelaskan, “*Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya*”.

Notaris memiliki jabatan kepercayaan dari orang yang bersedia menyerahkan kepercayaan kepada notaris dan notaris mempunyai kewajiban dalam menjaga rahasia semua yang diberitahukan kepada notaris, meskipun hal itu tidak tercantum didalam akta. Notaris juga berkewajiban untuk membuat akta dan apa yang ingin dicantumkan oleh para pihak serta notaris wajib berkewajiban untuk membacakan akta sehingga para pihak yang membuat akta paham akan isi dalam akta dan akses pada informasi tetap diberikan, termasuk kepada akses pada peraturan perundang-undangan yang sejalan sesuai dengan isi pada akta yang diminta oleh para pihak.

Akan isi dalam akta dan akses pada informasi tetap diberikan, termasuk kepada akses pada peraturan perundang-undangan yang sejalan Pada Pasal 4 dan Pasal 16 ayat (1) huruf f UUJN, diwajibkan bagi notaris menjaga rahasia isi akta dan seluruh keterangan yang diperoleh notaris dalam pembuatan akta tersebut seperti sumpah jabatan notaris notaris kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang. Terdapat kemungkinan pada adanya.

Notaris dapat melakukan adanya kemungkinan mengenai pelanggaran pada kewajiban notaris itu, seperti yang disebutkan pada Pasal 16 ayat (11) UUNJ, “seorang notaris dapat dikenai sanksi berupa teguran lisan sampai dengan pemberhentian dengan tidak hormat”

Dengan tujuan untuk membuat rahasia hal yang berhubungan dan bersinggungan dengan jabatan notaris ditulis dan diatur dalam hukum acara pidana, hukum acara perdata serta Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dan pada Pasal 170 ayat (1) KUHAP, dijelaskan “mereka yang karena pekerjaan, harkat, martabat atau juga jabatannya diwajibkan untuk menyimpan rahasia, dapat diminta dibebaskan dari penggunaan hak untuk memberikan keterangan sebagai saksi, yaitu tentang hal yang dipercayakan kepadanya”. Juga pada Pasal 1909 ayat (2) KUHPerdata, menjelaskan, “segala siapa yang karena kedudukannya, pekerjaannya atau jabatannya menurut Undang-Undang, diwajibkan merahasiakan sesuatu, namun hanyalah semata-mata mengenai hal-hal yang pengetahuannya dipercayakan kepadanya sebagaimana demikian”. Dalam Pasal 322 ayat (1) KUHP juga dituliskan “Barangsiapa dengan sengaja membuka rahasia yang wajib disimpannya karena jabatan atau pencahariannya, baik yang sekarang maupun yang dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau denda paling banyak enam ratus rupiah”.

Menurut Herlien Budiono, lalu lintas yang terdapat pada hubungan hukum privat disebutkan bahwa notaris memiliki wewenang dalam pembuatan akta autentik.

Pada akta autentik itu, terdapat bukti yang kuat dalam hal perkara perdata, karena itu notaris menjadi pejabat yang penting bagi masyarakat dan hukum. Notaris juga mempunyai kedudukan menjadi penasehat bagi masyarakat yang memerlukan bantuan untuk hukum serta pada klien yang datang ke notaris untuk meminta petunjuk hukum¹

Menurut Pasal 1 angka 1 UUNJN, “notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya”. Pasal 1868 KUHPerdata juga menyebutkan, “*suatu akta autentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang dan dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta tersebut dibuat*”.

Notaris sebagai pejabat umum, diberikan kewenangan dan kekuasaan yang didalamnya disangkut mengenai publik atau disebut *openbaar gezag* dalam Bahasa Belanda. Dari Pasal ini memberikan arti bahwa akta memiliki kekuatan hukum berupa bukti autentik, namun akta ini harus dibuat oleh pejabat umum yang memiliki kewenangan dan pada hal ini yang dimaksud adalah notaris yang mempunyai wewenang untuk berhak dalam membuat akta autentik yang berasal dari Undang-Undang².

¹ Herlin Budiono. 2006. *Asas Keseimbangan Bagi Hukum Perjanjian Indonesia, Hukum Perjanjian Berlandaskan Asas-Asas Wigati Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti. Hlm. 257.

² Budi Untung. 2005. *Hukum Koperasi dan Peran Notaris Indonesia*. Yogyakarta: Andi. Hlm.30.

Notaris merupakan salah satu perangkat hukum dan salah satu pejabat profesional yang memiliki hak ingkar janji yang mana telah disebutkan bahwa wajib dengan memegang teguh sumpah jabatannya dengan tidak mengungkapkan isi didalam akta tersebut, namun pada sisi yang lain, notaris wajib berpihak kepada kepentingan negara yang bertujuan untuk kemaslahatan publik dan kepentingan publik yang ditujukan pada selesainya proses hukum didalam peradilan sehingga dapat mengeluarkan putusan pengadilan yang adil dan bermanfaat serta dapat menjamin kepastian hukum. Pada munculnya permasalahan tersebut, notaris berada didalam dua sisi yaitu wajib untuk tetap tidak mengungkapkan isi akta atau merahasiakannya dan notaris juga wajib membuka isi akta tersebut kepada pihak ketiga tanpa ijin dari para pihak untuk keperluan penyidikan. Daris inilah notaris wajib untuk mendapatkan perlindungan hukum.

Perlunya diadakan perlindungan hukum untuk notaris, difokuskan agar notaris tetap menjaga rahasia isi akta saat pemeriksaan atau penyidikan pada notaris, dari tahapan penyidikan sampai pada tahap pengadilan untuk perkara pidana. Sedangkan masyarakat, sebagai klien dari notaris masih khawatir mengenai keamanan serta kerahasiaan akta yang dibuat notaris, hal ini dapat dikelompokkan pada masyarakat yang berpendidikan rendah serta dikelompokkan pada masyarakat yang untuk pertama kali datang ke kantor notaris.

Dari penjabaran diatas, maka penulis ingin menganalisis dan mempelajari lebih mengenai mengenai hak ingkar notaris terkait pembukaan kerahasiaan isi akta yang

dibuat notaris kepada pihak lain diluar akta dikaitkan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris dan penulis memutuskan untuk membuat rumusan masalah yaitu pengaturan secara hukum yang benar mengenai ketentuan notaris dapat menggunakan hak ingkar kepada pihak ketiga diluar akta yang terdapat dalam UUN dan perlindungan serta akibat hukum terhadap notaris terkait pembukaan kerahasiaan yang bersifat mutlak atau relatif mengenai isi akta yang dibuat notaris secara tanpa hak dan ijin dari para pihak.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis yuridis normatif, yang membahas mengenai doktrin atau asas didalam ilmu hukum³. Pada normatif, tidak dikenal data-data sehingga pada pemecahan isu hukum, sekaligus mencari dan menjelaskan tentang yang diperlukan pada sumber penelitian. Sumber bahan hukum dalam tesis ini memakai sumber primer dan sekunder⁴.

Bahan hukum sekunder yang paling utama adalah buku teks, Bahan hukum tersier terdiri dari jurnal hukum dan kamus-kamus hukum atau yang berhubungan dengan proposal ini. Teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan studi kepustakaan, Analisis bahan hukum menggunakan teknik preskriptif yaitu

³ Zainudin Ali. 2014. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika. Hlm. 24.

⁴ Fitria Dewi Navisa. 2020. Karakteristik Asas Kepentingan (Insurable Interest) Dalam Perjanjian Asuransi. *Jurnal Negara Dan Keadilan*. Volume 9 Nomor 2. Hlm. 192

mendapatkan penilaian tentang salah atau benarnya sesuatu permasalahan tersebut menurut fakta hukum dari hasil penelitian⁵

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Secara Hukum Yang Benar Mengenai Ketentuan Notaris Dapat Menggunakan Hak Ingkar Kepada Pihak Ketiga Yang Terdapat Dalam Undang-Undang Jabatan Notaris Bila Bertentangan Dengan Undang-Undang Lainnya

Hak ingkar pada notaris bisa dilaksanakan dengan batasan, yakni selama notaris yang diperiksa oleh instansi yang meminta pernyataan atau keterangan dari notaris tersebut, berkaitan dengan akta yang sudah dibuat notaris. Jika dilihat pada aspek teoritis dan pada peradilan, notaris yang melaksanakan jabatannya itu dipandang pada dimensi fundamental, notaris wajib melaksanakan kewajiban dalam jabatannya sesuai seperti Undang-Undang dan kode etik yang didalam kode etik tersebut mencakup aspek seperti aspek kehati-hatian, aspek adanya kecermatan, aspek kejujuran dan aspek amanah yang mana jika ada pengabaian didalam pembuatan akta terhadap aspek-aspek tersebut, maka notaris secara tidak langsung akan menanggung akibat-akibat pada pelanggaran tersebut.

Pada pelaksanaan jabatan notaris, notaris mempunyai kemungkinan untuk dipanggil dan hadir dalam penyidikan sebagai saksi pada akta yang telah dibuat notaris tersebut. Jika notaris tersebut, berhadapan pada keadaan ketika tidak bisa menyatakan kesaksiannya yang berdasarkan pada sumpah rahasia jabatan

⁵ *Ibid.* Hlm. 183

dan/atau menyatakan kesaksiannya sebatas pada notaris yang lihat dan dengar, baik hal ini dalam tingkatan penyidikan maupun pengadilan ⁶.

Pada hak ingkar janji, bisa digunakan untuk hak pengunduran diri sebagai saksi didalam persidangan dan/atau untuk tidak menyatakan kesaksiannya atau menyatakan kesaksiannya di persidangan yang dalam hal ini mempunyai kaitan pada permasalahan didalam akta yang telah dibuat notaris tersebut. Jika hak ingkar janji pada pernyataan kesaksian dikaitkan dengan rahasiwa jabatan, yang tertulis pada Pasal 170 ayat (1) KUHP dan Pasal 1909 ayat (2) KUHPerdara dan apabila notaris telah melanggar rahasia jabata itu, maka notaris dapat dikenai sanksi yang sudah tertulis pada Pasal 322 ayat (1) KUHP.

Dalam suatu proses pemeriksaan pada notaris baik hal tersebut pada penyelidikan atau penyidikan termasuk dalam proses persidangan, notaris dapat bersikap pasif yang mana dengan adanya hak ingkar tersebut, notaris hanya menjawab sebatas hal-hal mengenai pelaksanaan pada jabatannya itu. Dalam menjaga rahasia jabatan yang wajib dijaga oleh notaris, bukan hanya ditujukan untuk menjaga rahasia serapat mungkin namun juga mengenai seluruh apa yang didengar dan dilihat notaris dalam pelaksanaan jabatannya tersebut.

Hak ingkar ini seringkali terbentur pada kepentingan notaris, yakni ketika notaris wajib menjaga rahasia jabatan dan kewajiban dari jabatan tersebut. Sering

⁶ Hans Kelsen. 2006. *Teori Umum tentang Hukum dan Negara*. Bandung: Nusamedia dan Nuansa. Hlm. 78.

kali terjadi ketika penyidikan maupun dalam pelaksanaan penyelesaian perkara pidana. Notaris wajib berpegang teguh pada rahasia jabatannya dan ditujukan untuk menjaga kepentingan profesi notaris, pada sisi lainnya, notaris wajib mempertimbangkan kepentingan yang menyangkut kemaslahatan masyarakat umum.

Hak ingkar janji dalam penggunaannya dikembalikan lagi ke notaris tersebut, artinya dikembalikan pada hati nurani notaris masing-masing. Apabila notaris merasa berada pada posisi yang ambigu dan serba salah serta tidak berpihak kepada siapapun, maka notaris diperbolehkan untuk menggunakan hak ingkar janji tersebut, namun apabila keterangan yang dikeluarkan oleh notaris yang dalam hal ini sebagai saksi teramat sangat diperlukan dalam suatu persidangan, maka notaris bisa tidak menggunakan hak ingkar lalu memberikan pernyataan kesaksian didalam persidangan.

Terdapat pengecualian pada notaris ketika notaris wajib menyatakan kesaksian dikarenakan adanya hak ingkar tidak bisa dipergunakan jika hal itu mempunyai pertentangan dengan Undang-Undang lainnya, dan pada Pasal 16 ayat (1) huruf e dan Pasal 54 UUDN, pada kalimat paling akhir ditulis "... kecuali Undang-Undang menentukan lain".

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum adalah jaminan pada hukum tersebut yang wajib dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum itu menginginkan upaya hukum wajib terdapat pada perundang-undangan yang sudah tertulis dan telah dibuat oleh pihak berwenang. Aturan tersebut memiliki aturan dengan aspek yuridis yang bisa menjamin jika terdapat adanya kepastian pada hukum yang memiliki fungsi sebagai aturan yang wajib untuk ditaati⁷.

B. Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Terkait Pembukaan Kerahasiaan Yang Bersifat Mutlak Atau Relatif Mengenai Isi Akta Yang Dibuat Notaris Secara Tanpa Hak Dan Ijin Dari Para Pihak Di Dalam Akta Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris

Dalam teori perlindungan hukum terdapat beberapa ahli yang mengemukakan pendapatnya yaitu Satjipto Rahardjo, *Fitzgerald*, Phillipus M Hadjon dan Lily Rasyidi. Dalam kutipannya, *Fitzgerald* mengemukakan istilah teori perlindungan hukum yang dikutipnya dari Salmond, jika hukum tersebut mempunyai tujuan dalam menjadikan integrasi dan menjadi poros koordinasi untuk seluruh aspek dalam kehidupan bermasyarakat, karena sejatinya pada suatu kepentingan terdapat perlindungan pada kepentingan tertentu yang dilaksanakan dengan cara memberikan batasan pada kepentingan dipihak lain. Kepentingan hukum merupakan kepentingan untuk menjalankan urusan hak dan kepentingan masyarakat, sehingga hukum menjadi otoritas tertinggi dalam menentukan kepentingan manusia yang wajib diatur dan dilindungi.

⁷ Asikin Zainal. 2012. *Pengantar Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press. Hlm. 22.

Perlindungan hukum tersebut wajib dilihat menjadi beberapa tahap yaitu perlindungan yang lahir dari ketentuan hukum dan seluruh peraturan hukum yang dilaksanakan oleh masyarakat merupakan kesepakatan antar masyarakat dalam suatu kelompok tersebut untuk mengatur perilaku pada hubungan antar masyarakat baik secara perorangan ataupun dengan lembaga seperti pemerintah yang memang bertujuan untuk mewakili suara dan kepentingan masyarakat⁸.

Satjipto Rahardjo mengemukakan bahwa perlindungan hukum ditujukan untuk mengayomi masyarakat terutama dalam HAM yang sudah orang lain rugikan serta jika terdapat perlindungan hukum itu lalu diberikan kepada masyarakat bertujuan untuk agar masyarakat bisa menikmati hak-hak yang telah diatur dan diberikan oleh hukum⁹. Menurut Phillipus M. Hadjon, menyatakan jika perlindungan hukum kepada rakyat dilihat sebagai tindakan dari pemerintah yang mempunyai sifat preventif dan sifat represif. Perlindungan hukum preventif mempunyai tujuan agar tercegahnya sengketa dan mengarahkan agar pemerintah lebih bertindak dan bersikap secara hati-hati dalam pengambilan keputusan maupun bersikap yang berdasarkan pada diskresi. Lalu pada perlindungan represif mempunyai tujuan dalam mencegah adanya sengketa, termasuk pada penanganan sengketa pada pengadilan¹⁰.

⁸ Satjipto Raharjo. 2000. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. Hlm. 53

⁹ *Ibid*. Hlm. 69

¹⁰ *Ibid*, Hlm. 54

Menurut Lili Rasjidi dan I.B Wysa Putra menjelaskan jika hukum bisa dilakukan disfungsi pada pelaksanaanya untuk mewujudkan perlindungan yang mempunyai sifat tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga mempunyai sifat predektif dan antipatif¹¹. Perlindungan hukum adalah penggambaran yang berasal dari fungsi hukum dalam mencapai suatu keadilan, manfaat dan kepastian hukum bagi masyarakat dan perlindungan hukum merupakan tujuan. Perlindungan ini merupakan suatu perlindungan kepada subyek hukum yang sesuai dengan aturan hukum, baik hal itu termasuk perlindungan hukum yang bersifat preventif atau represif, perlindungan hukum secara tertulis maupun tidak tertulis.

Notaris sebagai lembaga yang profesional akan berusaha menjamin kepuasan kliennya dengan bekerja sebaik mungkin dengan cara membuatkan akta kliennya dengan jeli dan teliti agar terhindar dari kesalahan sedikitpun. Karena satu kesalahanpun yang dibuat Notaris akan sangat berdampak pada reputasi karirnya, artinya masyarakat sebagai klien akan beranggapan bahwa kinerja sang notaris dinilai kurang maksimal sehingga bisa membahayakan aktanya. Notaris berkewajiban menyadari kalau kode etik profesi, yang sudah digariskan secara

¹¹ Lili Rasjidi dan I.B Wysa Putra. 1993. *Hukum Sebagai Suatu Sistem*. Bandung : Remaja Rusdakarya. Hlm. 118

yuridis, sejatinya adalah perintah untuk dirinya, bahwa profesi yang dijalankannya berhubungan dengan kepentingan atau hak-hak lainnya.¹²

Dalam kenyataannya, memang masih banyak masyarakat yang kurang paham mengenai bahasa hukum yang tertuang pada akta autentik, tidak hanya bahasa hukum, namun juga mengenai hal-hal lainnya yang terkait pembuatan akta autentik di notaris, hal tersebut disebabkan masih rendahnya tingkat pendidikan di Indonesia, atau berpendidikan tapi tidak mendalami perhukuman di Indonesia. Akibatnya banyak dari masyarakat yang bertanya-tanya tentang kerahasiaan aktanya yang mereka percayakan di notaris. Hal tersebut terjadi karena banyak masyarakat tidak tahu tentang siapa dan undang-undang apa saja yang dapat membuat aktanya terlindungi kerahasiannya.

Munir Fuady menjelaskan bahwa rahasia pada suatu jabatan bisa terbuka jika didalamnya adalah jabatan profesi dan notaris dapat membuka atau mengutarakan isi aktanya tersebut, bahwa rahasia jabatan notaris dapat dibukakan dengan alasan-alasan tersebut yang telah memenuhi pengkategorian sebagai berikut, yaitu: mendapatkan izin dari para pihak karena hubungan pada notaris dan para pihak adalah hubungan yang dianggap setara, sehingga izin dalam membuka suatu rahasia akta jabatan hanya bisa diberikan jika mendapatkan persetujuan dari para pihak; kepentingan umum menghendaki dan mewajibkan; Undang-Undang

¹² Abdul Wahid, Mariyadi, Sunardi. 2017. *Penegakan Kode Etik Profesi Notaris*. Tangerang: Nirmana Media. Hlm. 4.

yang lebih khusus memperbolehkan terbukanya rahasia jabatan itu, dicontohkan pada adanya nota kesepahaman antara Kepolisian RI dengan INI dan IPPAT.

Perlindungan pada notaris memiliki tujuan untuk, perlindungan kepada hak dan kewenangan sebagai notaris ketika menjalankan tugas seperti yang telah diatur didalam UUJN serta kode etik, yang wajib dilaksanakan sesuai dengan ketentuan kode etik maupun perundang-undangan yang berlaku, baik hal itu berdasarkan pada hukum, moral dan etika profesi. Hal tersebut diberlakukan kepada notaris agar terdapat perlindungan hukum yang terjamin serta untuk kepastian hukum bagi notaris dan bagi kepentingan khalayak umum¹³.

Pada kesalahan yang mempunyai sifat pribadi, notaris sama seperti masyarakat biasa yang bisa dimintai keterangannya serta dituntut untuk melakukan pertanggung jawabannya. Dan demikian, mempunyai mekanisme perlindungan hukum yang setara dengan masyarakat. Pada kesalahan yang mempunyai hubungan dengan jabatan pada notaris, serta adanya mekanisme pada perlindungan hukum wajib berbeda dengan masyarakat biasa. Adanya perbedaan ini ditujukan dari kedudukan notaris yang sebagai pejabat umum dan yang membuat akta autentik

Ikatan Notaris Indonesia atau disebut INI sebagai organisasi profesi notaris yang dianggap masyarakat umum lebih mengetahui dan mengerti keadaan

¹³ Paulis Effendie Lotulong. 2002. Perlindungan Hukum Bagi Notaris, Selaku Pejabat Umum Dalam Menjalankan Tugasnya. *Jurnal Hukum Volume IV Nomor 13*. Hlm. 88.

serta pada praktek notaris sehingga pelanggaran yang ada pada profesi notaris wajib diperiksa terlebih dahulu oleh Majelis Pengawas sebelum ditentukannya pelanggaran tersebut masuk pada kategori pribadi ataupun pelanggaran profesi. Sehingga pihak penyidik dan Majelis Pengawas wajib bekerja sama untuk memberikan perlindungan hukum bagi notaris.

Dengan adanya perlindungan tersebut, maka notaris merasa dilindungi serta akan tercipta rasa tenang, tentram dan notaris memiliki jaminan pada perlindungan hukum ketika melaksanakan tugas sebagai pejabat umum. Dan notaris merasa memiliki perlindungan lebih karena seluruh kegiatan pemeriksaan yang dilakukan itu setelah mendapatkan pemeriksaan dan penelitian secara cermat dan teliti oleh Majelis Pengawas. Hal ini telah tertulis dalam Pasal 66 UUDN, namun terdapat pengecualian yaitu Majelis Pengawas tidak bisa melindungi secara hukum apapun bentuknya kepada notaris yang benar terbukti bahwa notaris tersebut bersalah ketika menjalankan tugasnya sebagai pejabat umum.

Kepercayaan dari masyarakat juga dianggap perlu bagi notaris, karena sebagai akibat jaminan adanya pengawasan tersebut, agar tugas serta kewenangan pekerjaan dari notaris selalu sesuai dengan aturan hukum yang berlaku dan hal ini menjadi dasar dari kewenangan serta dasar agar notaris dapat menghindari kesalahan lain seperti adanya keselewengan wewenang atau turunnya kepercayaan dari masyarakat untuk notaris. Kewajiban lain notaris adalah

menjunjung tinggi kode etik profesi yang sudah disepakati didalam INI yakni sebagai dasar kehidupan untuk berperilaku.

KESIMPULAN

Pada notaris yang telah memberikan keterangan pernyataanya sebagai saksi yang berhubungan langsung dengan akta yang telah dibuatnya dan dapat mengakibatkan bocornya rahasia klien atau akan berpihak pada salah satu klien, namun apabila keterangan notaris tersebut sangat diperlukan bagi suatu proses persidangan dan terdapat kepetingan yang lebih tinggi maka notaris bisa memilih untuk tidak mempergunakan hak ingkar tersebut serta menyatakan kesediaanya untuk bersaksi dalam persidangan seperti pada contoh Jenderal Pajak jika meminta untuk diperlihatkan terhadap surat-surat yang diperlukan khusus perihal penetapan pajak seseorang atau suatu badan, maka notaris dapat dibebaskan dari rahasia jabatannya. Meskipun terdapat hak ingkar pada notaris dan dalam menentukan pilihannya tersebut, notaris akan menyatakan kesaksiannya atau tidak bersaksi. Dan hakim akan memilih serta memutus, apakah notaris wajib untuk memberikan kesaksian pada proses penyelesaian perkara tersebut atau tidak.

Perlu diingat, bahwa notaris tidak bisa memakai hak ingkar yang berada dalam UUJN jika bertentangan dengan Pasal 16 ayat (1) huruf e UUJN yang pada kalimat terakhir menyebutkan, “..... kecuali Undang-Undang menentukan lain”.

SARAN

Sehubungan dalam hal pembukaan rahasia isi akta, maka sewajibnya para penegak hukum seperti JPU, hakim maupun polisi untuk saling menghormati agar seluruh pihak bisa menjalankan fungsi yang baik dan benar serta dalam pekerjaannya sesuai dengan aturan Perundang-Undangan, yang mana ditujukan untuk melayani masyarakat. Oleh karena itu, wajib diperlukan pemahaman seutuhnya mengenai UUJN khususnya pada Pasal 66 yang mengatur mengenai pemanggilan notaris. Hal tersebut ditujukan kepada pihak kepolisian agar saat penyidikan berlangsung lebih dapat mengerti ketentuan mengenai pemanggilan notaris, maka diperlukan sosialisasi mengenai aturan dalam UUJN dan nota kesepahaman tersebut. Meskipun notaris telah berbekal hak ingkar janji, namun notaris tetap wajib untuk hati-hati dan menjalankan aturannya serta untuk menjaga reputasi serta keamanan profesinya.

Disarankan pada INI untuk ikut memberikan perlindungan bagi notaris yang sedang menjalankan tugas sesuai dasar perundang-undangan notaris, agar notaris tersebut dapat menjalankan jabatannya dengan nyaman dan lebih terasa mendapatkan perlindungan. Dan saran untuk masyarakat, agar sepenuhnya dapat mempercayakan rahasia aktanya tersebut kepada notaris, selama akta itu tidak mempunyai indikasi dalam tindak pidana.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Wahid, Mariyadi, Sunardi. 2017. *Penegakan Kode Etik Profesi Notaris*. Tangerang: Nirmana Media.
- Budi Untung. 2005. *Hukum Koperasi dan Peran Notaris Indonesia*. Yogyakarta: Andi
- G.H.S. Lumban Tobing. 1992. *Peraturan Jabatan Notaris*. Jakarta: Erlangga
- Herlin Budiono. 2006. *Asas Keseimbangan Bagi Hukum Perjanjian Indonesia, Hukum Perjanjian Berlandaskan Asas-Asas Wigati Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti
- Hans Kelsen. 2006. *Teori Umum tentang Hukum dan Negara*. Bandung: Nusamedia dan Nuansa
- Lili Rasjidi dan I.B Wisa Putra. 1993. *Hukum Sebagai Suatu Sistem*. Bandung : Remaja Rosdakarya
- Satjipto Raharjo. 2000. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Zainudin Ali. 2014. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika

Jurnal

- Fitria Dewi Navisa. 2020. Karakteristik Asas Kepentingan (Insurable Interest) Dalam Perjanjian Asuransi. *Jurnal Negara Dan Keadilan*. Volume 9 Nomor 2.
- Paulus Effendie Lotulong. 2002. Perlindungan Hukum Bagi Notaris Selaku Pejabat Umum Dalam Menjalankan Tugasnya. *Jurnal Hukum Volume IV Nomor 13*.